

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

RENJA

**RENCANA
KERJA**

**TAHUN
2025**





KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat - Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 telah selesai disusun. RENJA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara selama satu tahun dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENJA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara ini saya ucapkan terima kasih, kritik dan saran yang membangun tetap kita harapkan guna penyempurnaan usulan Program/Kegiatan Prioritas tersebut.

Wassalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Kendari, Maret 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

DR. M. RIDWAN BADALLAH, S.Pd., MM

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d

NIP. 19700319 199702 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DAERAH TAHUN 2024	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra.....	7
2.2. Analisis Kinerja	21
2.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan.....	21
2.2.2 Evaluasi Kinerja	27
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/RENJA.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3. Program dan Kegiatan	41
BABVPENUTUP.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah menjadi bagian yang sangat penting bagi semua sektor. Sektor pemerintahan merupakan salah satu yang turut menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Karena dengan adanya teknologi informasi dapat membantu berbagai proses aktivitas yang dilaksanakan setiap harinya dan penambah nilai potensi yang ada. Untuk menjaga agar teknologi informasi menjadi penambah nilai bagi pemerintah, diperlukan sebuah tata kelola teknologi informasi agar dapat menyelaraskan strategi, mengatur dan mengontrol semua yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dengan penambahan nilai serta menyeimbangkan resiko yang ada.

Pemanfaatan teknologi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting, dengan adanya perkembangan yang signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang



komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e- government* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Sulawesi Tenggara.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi komunikasi dan informatika, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kurun waktu tahun 2025, yang mengacu pada rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dengan tema **“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG”**. Sebagai repleksi tema tersebut, maka rancangan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 bidang Komunikasi dan Informatika adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dengan arah kebijakan :

1. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan *e-Planning* dan *e-Budgeting*.
2. Optimalisasi Inovasi Daerah.



2.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);



18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2212 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).

2.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan program-program Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai perwujudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2026 sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tercapai;
2. Sebagai pedoman Rencana Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.



2.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja: capaian renstra, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja OPD serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja sampai dengan bulan Maret tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 17,00%, maka termasuk dalam kategori predikat sedang, adapun realisasi keseluruhan anggaran sampai dengan bulan Maret 2024 belanja Operasi dan belanja modal sebesar Rp. 1.234.958.478,- yang dari total rencana anggaran belanja Operasi dan belanja Modal sebesar Rp. 11.461.674.931,- Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel masing-masing sebagai berikut :



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN (TRIWULAN I TAHUN 2024) DAN REALISASI RPJMD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. SULTRA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2025	Realisasi tagret Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target Kinerja Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran S/D triwulan I Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	11
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%					Dinas Kominfo
01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%					Dinas Kominfo
01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%	Dinas Kominfo
01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%	Dinas Kominfo
01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%	Dinas Kominfo



01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang Tepat Waktu	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	10 Dokumen	100%	Dinas Kominfo
01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	60 Bulan	51 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	54 Bulan	90%	Dinas Kominfo
01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %					
01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	70 Bulan	59 Bulan	14 Bulan	3 Bulan	21%	62 Bulan	89%	Dinas Kominfo
01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	3 Tahun	0%	Dinas Kominfo
01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	3 Kegiatan	0%	Dinas Kominfo
01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tepat Waktu	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	60%	Dinas Kominfo
01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Bulan	51 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	54 Bulan	90%	Dinas Kominfo
01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Tahun	3 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	3 Tahun	0%	Dinas Kominfo
01	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	-	100%					Dinas Kominfo



01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	33%	Dinas Kominfo
01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Bulan	49 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%	49 Bulan	82%	Dinas Kominfo
01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	33%	Dinas Kominfo
01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Bulan	49 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	52 Bulan	87%	Dinas Kominfo
01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Bulan	49 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	52 Bulan	87%	Dinas Kominfo
01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnyan Kualitas Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	-	100 %					
01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	5 Tahun	Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	0 Tahun	0%	Dinas Kominfo
01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	434 Pasang	163 Pasang	160 Pasang	0 Pasang	0%	163 Pasang	38%	Dinas Kominfo
01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	80 Persen	100 %	0 %	0%	80 %	98%	Dinas Kominfo
01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	58%	Dinas Kominfo
01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional	100 Persen	80 Persen	100 %	0 %	0%	80 %	80%	Dinas Kominfo



01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 Kegiatan	20%	Dinas Kominfo
01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	80 Persen	100 %	0 %	0%	80 %	43%	Dinas Kominfo
01	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun					Dinas Kominfo
01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Biaya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan Kebutuhan	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Biaya Bahan Logistik Kantor sesuai Kebutuhan	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Jasa Cetak dan Penggandaan sesuai Kebutuhan	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Kunjungan Tamu	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan Luar Daerah	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo



01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Bulan	49 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%	49 Bulan	82%	Dinas Kominfo
01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kebutuhan	100 %		100%					Dinas Kominfo
01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	20%	Dinas Kominfo
01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	0 -	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%	Dinas Kominfo
01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	5 Paket	4 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	4 Paket	80%	Dinas Kominfo
01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	5 Paket	100%	Dinas Kominfo
01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung Kantor yang Dilengkapi Infrastruktur dan Jaringan TIK yang Memadai	5 Paket	4 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	4 Paket	80%	Dinas Kominfo
01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Memadai	5 Paket	4 Paket	1 Paket	0 Paket	0%	4 Paket	80%	Dinas Kominfo
01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		1 Tahun					
01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Jasa Surat Menyurat	60 Bulan	51 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	54 Bulan	90%	Dinas Kominfo



01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	60 Bulan	51 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	54 Bulan	90%	Dinas Kominfo
01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Biaya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Prima	60 Bulan	51 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	25%	54 Bulan	90%	Dinas Kominfo
01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %		1 Tahun					
01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	1.58 Tahun	32%	Dinas Kominfo
01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
01	1.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	1.58 Tahun	32%	Dinas Kominfo



01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	1.58 Tahun	32%	Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi & Informatika												
02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	100%		60 %	96 Persen				
02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi dengan Baik	5 Tahun		60 %	96 Persen				
02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Peraturan dan Kebijakan Teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	10 Kegiatan	8 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	8 Kegiatan	80%	Dinas Kominfo
02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	7 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	5 Kegiatan	71%	Dinas Kominfo
02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	13 Kegiatan	10 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	10 Kegiatan	77%	Dinas Kominfo
02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan Baik	15 Kegiatan	12 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	12 Kegiatan	80.0%	Dinas Kominfo
02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Baik	60 Bulan	51 Bulan	12 Bulan	0 Bulan	0%	51 Bulan	85%	Dinas Kominfo



02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang Prima	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Tersebaranya Informasi Publik dan Program Kerja serta Hasil Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Publikasi Media	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terwujudnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	100%	Dinas Kominfo/ KPID
02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Terselenggaranya Manajemen Komunikasi Krisis	10 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	40%	Dinas Kominfo
02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	100 %	100%	Dinas Kominfo
02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terselenggaranya Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan Baik	5 Tahun	4.25 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	25%	4.5 Tahun	90%	Dinas Kominfo
02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Implementasi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	13 Kegiatan	10 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	10 Kegiatan	77%	Dinas Kominfo
02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	0 Paket	0%	1 Paket	20%	Dinas Kominfo
03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet	100%		90 %	89 Persen				



03	1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase OPD yang Telah Memiliki Layanan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	100%		90 %	89 Persen					
03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	10 Kegiatan	8 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	8 Kegiatan	80%	Dinas Kominfo
03	1.01	03	Peyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Cakupan OPD yang Terhubung dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	100 %	90 %	0 %	0%	100 %	100%	Dinas Kominfo
03	1.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100 %		60 %	%		%		
03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	80%	Dinas Kominfo
03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo



03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	80%	Dinas Kominfo
03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	10 Kegiatan	9 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	9 Kegiatan	90%	Dinas Kominfo
03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik	11 Kegiatan	8 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	11 Kegiatan	100%	Dinas Kominfo
03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	10 Kegiatan	8 Kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0%	8 kegiatan	80%	Dinas Kominfo
03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100 %	80 %	100 %	0 %	0%	80 %	80%	Dinas Kominfo
03	1.02	11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Terselenggaranya Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun	80%	Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												



02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%		85 %					
02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	100%		100%					
02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	16 Kegiatan	11 Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	11 Kegiatan	69%	Dinas Kominfo
02 1.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	80 %	100%	0 %	0%	80 %	80%	Dinas Kominfo
02 1.01 03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	100%	80 %	40 %	0 %	0%	80 %	80%	Dinas Kominfo
02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	4 Kegiatan	80%	Dinas Kominfo
02 1.01 05	Pengembangan Infrastruktur	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Memadai dan Representatif	7 Paket	4 paket	2 Paket	0 Paket	0%	4 Paket	57%	Dinas Kominfo
02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	12 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	9 Kegiatan	75%	Dinas Kominfo



Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%		90 %					
02	1.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi	100%		50 %					
02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Tersedianya Peraturan dan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	7 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	5 Kegiatan 71%	Dinas Kominfo
02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Kebutuhan'	100%	70 %	100%	0 %	0%	70 % 70%	Dinas Kominfo
02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang Baik	13 Kegiatan	8 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	8 Kegiatan 62%	Dinas Kominfo
02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	5 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0%	4 Tahun 80%	Dinas Kominfo
02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	100%		60 %	0 %		%	



02	1.02	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Dukungan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	13 Kegiatan	10 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	10 Kegiatan	77%	Dinas Kominfo
----	------	----	---	--	-------------	-------------	------------	------------	----	-------------	-----	---------------



2.2 ANALISIS KINERJA

Laporan ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018-2025 beserta indikatornya adalah merupakan capaian kinerja suatu instansi atau unit kerja dalam kurun waktu tertentu, dimana pengukuran kinerja ditetapkan berdasarkan sasaran atau tujuan dari kegiatan yang tertuang dalam perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Indikator yang dipergunakan dalam melakukan pengukuran kinerja adalah indikator *input* dan *output*, sedangkan indikator *outcome*, *benefit* dan *impact* (dampak) akan dilakukan pengukurannya apabila sudah dimungkinkan, untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 secara rinci dapat dilihat dalam rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja table diatas.

2.2.1 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan kedalam :

- a. Kelompok indikator *input*, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan;
- b. Kelompok indikator *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Kelompok indikator *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kelompok indikator *benefit* adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Kelompok indikator *impact* ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian.



Dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat diketahui bahwa kelompok sasaran yang ditetapkan dalam renstra, pada dasarnya telah dicapai dengan baik. Sementara dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) secara umum mencapai target dari kegiatan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik.

Indikator kinerja yang digunakan dalam tahun 2024 Dinas Kominfo Prov. Sultra merupakan indikator hasil (*outcome*). Dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2024 telah ditetapkan indikator- indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel Capaian Indikator Kinerja Kondisi Bulan Maret 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN REALISASI 2024		
			TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	100%	15%	15%
1.1	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Kinerja Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15%	15%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang Tersedia Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersedia Tepat Waktu dan sesuai dengan Tahapan Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporn Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	12 Bulan	3 Bulan	25%



1.2	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15%	15%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN Sesuai dengan Peraturan Yang berlaku	14 Bulan	3 Bulan	21%
1.2.2	Kordinaasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedia Tepat Waktu	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan SKPD	Tersedianyan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan SKPD	12 Bulan	0%	25%
1.3	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	0%	0%
1.3.1	Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanakannya Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	0%	0%
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	0%	0%
1.4	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	0%
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	0%	0%
1.4.2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	0%	0%
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	100%	0%	0%
1.5	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Kinerja Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.5.1	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Biaya Pengadaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3 Bulan	25%



1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Biaya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Jasa Cetak Dan Penggandaan	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat dan Penerimaan Tamu	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.5.6	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.6	Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	0%
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	1 Paket	0 Paket	0%
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	0 Paket	0%
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	0 Paket	0%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3 Bulan	25%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi ,Air dan Listrik	12 Bulan	3 Bulan	25%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayan Umum Knator	12 Bulan	3 Bulan	25%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jurusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.8.1	Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediahnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	3 Bulan	25%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	3 Bulan	25%



		Lainnya			
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 Tahun	3 Bulan	25%
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	80%	46%	46%
		Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dimanfaatkan bagi Masyarakat	90%	80%	80%
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi dengan Baik	1 Tahun	3 Bulan	25%
2.1.1	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang Prima	1 Tahun	3 Bulan	25%
2.1.2	Layanan Hubungan Media	Tersebarannya Informasi Publik dan Program Kerja serta Hasil Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Publikasi Media	1 Tahun	3 Bulan	25%
2.1.3	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Terselenggaraannya kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.1.4	Penguatan Tata Kelola Komisi Informais fdi Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	1 Tahun	3 Bulan	25%
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Terhubung dengan Internet dan Memiliki Website Resmi Pemerintah	90%	75%	75%
		Cakupan Layanan Telekomunikasi untuk Masyarakat (Jaringan Komunikasi dan Internet)	80%	70%	70%
3.1	Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah	60%	40%	40%



		Daerah Provinsi			
3.1.1	Penataaksanaan Dan Pengawasan E- <i>Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan E- <i>Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	3 Bulan	25%
3.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersediahnya Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dan Proses Bisnis Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	80%	80%	80%
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1 Tahun	0%	0%
4.1.1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	0%	0%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	90%	90%	90%
5.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi	50%	10%	10%
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang Baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%



2.2.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah pemberian nilai dari semua kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis tertentu untuk menentukan manfaat dari kegiatan dimaksud evaluasi kinerja dipergunakan untuk membandingkan hasil yang dicapai saat ini dan hasil yang dicapai masa lalu dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, maka secara berjenjang yang dievaluasi adalah kinerja sasaran dan kegiatan.

Bahwa pencapaian sasaran–sasaran indikator berdasarkan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 36 (tiga puluh enam) indikator yang dicapai dengan total rata–rata sebesar 17% sampai dengan bulan Maret 2024, tercapainya kinerja yang baik ini disebabkan karena adanya dukungan komitmen dari sumberdaya manusia yang bekerja secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan untuk mencapai sasaran tidak dijumpai permasalahan /hambatan yang berarti.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi dana pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN sebagai belanja operasi dan belanja modal sebesar Rp. 11.461.674.931,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.234.958.478,- atau sebesar 17%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian alokasi anggaran tiap program kondisi bulan Maret 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah anggaran Rp.7.723.279.931,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.297.048.120,- atau sebesar 17%.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah anggaran Rp.3.411.945.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.474.000.000,- atau sebesar 14%.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika anggaran Rp. 303.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.147.000.000,- atau sebesar 48%.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah anggaran Rp.9.225.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0 ,- atau sebesar 0%.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Jumlah anggaran Rp.14.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.



2.2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat kinerja pelayanan adalah memberikan penerangan berita tentang pembangunan Sulawesi Tenggara menjelaskan program kerja pemerintah daerah Sulawesi Tenggara untuk diketahui oleh masyarakat lewat media cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mengetahui dan memahami kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sumber Daya Manusia yang masih dibutuhkan yang memiliki keahlian di bidang persandian, jaringan telekomunikasi, pranata humas dan yang memiliki keahlian di bidang perangkat teknologi Informasi.
3. Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mempublikasikan dan mendokumentasikan semua kegiatan pemerintahan, menyiapkan menyediakan ruang wartawan agar semua informasi kegiatan gubernur dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat terpublikasikan ke masyarakat.
4. Menyelaraskan program kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan visi misi program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informasi, dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah maka kami menghadapi beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.



A. Identifikasi Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Pengelolaan data center belum optimal
3. Pengamanan Sistem Informasi Program Pemerintah belum efektif

Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Kominfo)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kominfo)	
1	2	3	4	5	6
Hasil Penilaian layanan informasi OPD dan Kab/Kota di Sulawesi Tenggara	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik masih 20%	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 - PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 - Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik - Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	SDM yang kurang mumpuni	Koordinasi dan integrasi lintas Sektoral	Respon dan kepedulian pimpinan badan publik/PD masih kurang
Persentase Partisipasi Aktif Lembaga Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Partisipasi Lembaga Komunikasi Publik saat ini sudah mencapai 0,00 %	Permenkominfo no.08/PER/M.KOMINFO tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo	Pembentukan KIM bukan merupakan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi karena KIM tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat	Pembentukan KIM merupakan kewenangan dari kabupaten/kota	Belum optimalnya fungsi pembinaan KIM di kabupaten/kota
Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan		Belum ada pergub	Standar operasional prosedur keamanan informasi	Aplikasi yang belum didaftarkan ke Dinas Kominfo	Masih bergantung pada pihak ketiga



informas					
Persentase pemanfaatan hosting dan collocation data center Pemprov. Sultra		Permenkominfo No. 41 Tahun 2007, tentang panduan umum tata kelola TIK	Belum optimalnya penggunaan Server	Kepercayaan	Belum Optimal
Persentase data statistik pembangunan yang dipublikasikan	Terpublikasinya Data statistik sektoral	Perka BPS Nomor 9 Tahun 2008	Belum didukung kapasitas SDM yang paham bidang statistik		<ul style="list-style-type: none"> - Matriks data sektoral PERANGKAT DAERAH (PD) - Belum ada data sektoral yang digali dari Perangkat Daerah (PD) - Belum adanya Juknis pelaksanaan tugas

B. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Sasaran	Isu Strategis
1	Komunikasi dan Informatika	Belum optimal pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pembangunan Infrastruktur jaringan yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terbatasnya akses dan Kapasitas informasi dan komunikasi 2 Kurangnya SDM yang ahli dibidang TIK 3 Belum terwujudnya SMART SULTRA EMAS
2	Statistik	Pengelolaan data center belum optimal	Tersedianya data ter - update	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum terbangun infrastruktur data center 2 Belum tersedianya data ter-update dan mudah diakses
3	Persandian	Pengamanan Sistem Informasi Program Pemerintah belum efektif	Pengamanan sistem informasi program pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penguatan pengamanan informasi. 2. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pengamanan informasi



2.2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renja Dinas Kominfo

Berdasarkan Hasil Review Terhadap Rancangan RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Urusan Bidang/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
		Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10,247,550,000
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	44,100,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	1 Dokumen	5,775,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	1 Dokumen	5,775,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Tahapan Perencanaan	1 Dokumen	5,775,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang Tepat Waktu	2 Dokumen	5,775,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Secara Berkala	12 Bulan	15,750,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7,025,557,458
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	14 Bulan	6,738,039,772
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	9,975,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Kegiatan	9,975,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tepat Waktu	1 Dokumen	30,442,230
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	227,150,456
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Tahun	9,975,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Meningkatnya Kualitas Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah	100%	109,431,000



Daerah	pada Perangkat Daerah		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	7,875,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Kegiatan	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	68,481,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	33,075,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnyan Kualitas Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	709,895,130
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	1 Tahun	63,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	265,571,964
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	8,203,650
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional	100%	119,544,516
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 Kegiatan	88,200,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	165,375,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2,105,367,685
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Biaya Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	25,154,640
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan Kebutuhan	1 Tahun	16,275,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Biaya Bahan Logistik Kantor sesuai Kebutuhan	1 Tahun	112,428,187
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Jasa Cetak dan Penggandaan sesuai Kebutuhan	1 Tahun	78,750,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	31,500,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Kunjungan Tamu	1 Tahun	139,650,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan Luar	1 Tahun	1,644,909,857



SKPD	Daerah		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	56,700,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kebutuhan	100%	1,526,484,120
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	472,500,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	472,500,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel	1 Paket	95,397,120
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	223,587,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Gedung Kantor yang Dilengkapi Infrastruktur dan Jaringan TIK yang Memadai	1 Paket	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Memadai	1 Paket	262,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	312,549,641
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Biaya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	4,769,856
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	123,420,024
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Biaya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	43,524,936
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Prima	12 Bulan	140,834,825
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Tahun	497,672,175
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	108,538,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	108,538,700
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1 Tahun	26,250,000



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	16,978,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	196,756,560
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	40,609,716
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi & Informatika			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Layanan Publik yang diselenggarakan Secara online dan Terintegrasi	100%	7,059,517,500
	Persentase Media Informasi dan Komunikasi Publik yang dimanfaatkan bagi Masyarakat	100%	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi dengan Baik	1 Tahun	10,726,960,860
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Peraturan dan Kebijakan Teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Kegiatan	349,650,000
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Kegiatan	196,350,000
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	262,500,000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan Baik	3 Kegiatan	340,778,340
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Baik	2 Kegiatan	475,803,720
Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang Prima	1 Tahun	1,028,764,800
Layanan Hubungan Media	Tersebaranya Informasi Publik dan Program Kerja serta Hasil Pembangunan Pemerintah Daerah Melalui Publikasi Media	1 Tahun	4,364,325,000
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terwujudnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Kegiatan	1,102,500,000
Manajemen Komunikasi Krisis	Terselenggaranya Manajemen Komunikasi Krisis	2 Kegiatan	717,992,100
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100%	160,125,000
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terselenggaranya Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan Baik	1 Tahun	672,921,900
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Implementasi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3 Kegiatan	687,750,000



Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	367,500,000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Terhubung dengan Internet dan Memiliki Website Resmi Pemerintah	100%	3,538,132,500
	Cakupan Layanan Telekomunikasi untuk Masyarakat (Jaringan Komunikasi dan Internet)	90%	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase OPD yang Telah Memiliki Layanan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	488,904,675
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	2 Kegiatan	113,116,500
Peyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Cakupan OPD yang Terhubung dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	375,788,175
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	80%	4,730,985,882
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	96,599,790
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Kegiatan	332,244,593
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Tahun	263,746,004
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Kegiatan	81,585,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 Kegiatan	666,458,604
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	4 Kegiatan	1,234,021,326



Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berbasis Elektronik		
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 Tahun	651,221,216
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	2 kegiatan	345,706,647
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	865,541,263
Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Terselenggaranya Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	1 Tahun	193,861,439
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Sulaesi Tenggara	100%	752,535,000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1 Tahun	752,535,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Kegiatan	145,950,000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	168,000,000
Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	60%	178,605,000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1 Kegiatan	192,893,400
Pengembangan Infrastruktur	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Memadai dan Representatif	2 Paket	2,743,650,000
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	3 Kegiatan	732,280,500
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	40%	736,680,000



Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi	75%	367,925,250
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Tersedianya Peraturan dan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	84,000,000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Kebutuhan'	100%	116,550,000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang Baik	3 Kegiatan	103,083,750
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Tahun	64,291,500
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	60%	86,625,000
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Dukungan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	3 Kegiatan	86,625,000
TOTAL			22,514,415,000



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : Penciptaan layanan pos dan telematika yang efisien dan modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge based society*), Pengembangan *e-Procurement*, Pengembangan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan *e-government*. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, pos, internet, dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

Melalui program ini pemerintah secara aktif mendorong pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Program ini juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui serangkaian program peningkatan penelitian pengembangan TIK berbasis lokal, program peningkatan pembangunan SDM TIK Indonesia untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan informasi ini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada Program pengembangan Aplikasi *e-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standardisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan. Selain itu bahwa *e-procurement* juga dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%), mengurangi cost per tender (20% cost per tender), *lead time savings* (4,1 bulan – 6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan– 11,8 bulan untuk tender terbatas).

Dalam perkembangannya, sistem *e-procurement* diharapkan akan menjadi aplikasi yang



mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Program Pemerintah pada Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). LPSE menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Berdasarkan Rencana Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2021 melalui RPJP, maka Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan system komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi modern;
- c. Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis / pedoman dibidang komunikasi dan informasi untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat dibidang Kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informasi.



3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11.461.674.931,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.461.674.931,00							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.645.724.931,00							0,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	6.203.174.931,00						-	0,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	21 Dokumen			-	44.100.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	7 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pem erintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	5.775.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Laporan			1 Laporan	15.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	9 Dokumen			-	3.023.349.931,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/ Bulan			55 Orang/ Bulan	2.846.924.931,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60 Orang/ Bulan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	157.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	5.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	36 Laporan			12 Laporan	5.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	2.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 Dokumen			-	43.050.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	3.675.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	31.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	2.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	2.625.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	3 Dokumen			-	213.925.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	3 Unit			1 Unit	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	6 Paket			2 Paket	50.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	3.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	5.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang			1 Orang	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	300 Orang			100 Orang	57.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	12 Orang			4 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3 Dokumen			-	1.089.375.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket			1 Paket	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket			2 Paket	5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			4 Paket	55.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			4 Paket	26.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	4 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	24 Laporan			12 Laporan	68.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	24 Laporan			12 Laporan	892.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	26.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			-	17 Paket			-	800.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	6 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	3 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Paket			2 Paket	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	30 Unit			10 Unit	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	24 Laporan			-	666.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan			1 Laporan	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	36 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan			1 Laporan	5.250.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36 Laporan			12 Laporan	555.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	323.375.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	30 Unit			10 Unit	84.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	10 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit			1 Unit	15.750.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	15 Unit			5 Unit	10.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	5 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	60 Unit			20 Unit	13.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	20 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	6 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	2 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	2.558.325.000,00						-	0,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	3 Dokumen			-	2.558.325.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				12 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	15.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				30 Orang	97.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				80 Persentase	66.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 Persentase	69.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				2 Dokumen	48.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				30 Komunitas	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				25 Permohonan	51.275.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	77.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	72.450.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	1.884.225.000,00						-	0,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	100% persen 100% persen			-	163.550.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	100% persen 100% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				2 Dokumen	163.550.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	60% persen 60% persen			-	1.720.675.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60% persen 60% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	20.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	81.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	34.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda</i>				1 Laporan	195.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>				3 Aplikasi	52.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			<i>Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas</i>				55 unit	53.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				5 kabupaten/kota	82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			<i>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</i>				5 Layanan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah</i>				1 Dokumen	34.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>				1 Dokumen	34.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo</i>				1 Dokumen	34.125.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>				25 Perangkat Daerah	705.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			<i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>				3 Aplikasi	52.500.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>				1 Dokumen	121.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi</i>				25 perangkat daerah	200.000.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						329.270.000,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	329.270.000,00						-	0,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	80% persen			-	329.270.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	80% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				5 Orang	49.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu</i>				80 Persentase	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan</i>				80 Persentase	56.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			<i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i>				1 Dokumen	37.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>				1 Dokumen	130.855.000,00	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						486.680.000,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	486.680.000,00						-	0,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-	60% persen			-	400.055.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	83.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	9 Laporan			3 Laporan	64.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	9 Laporan			3 Laporan	170.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	3 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	30 Perangkat Daerah			20 Perangkat Daerah	81.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	60% persen			-	86.625.000,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	60% persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>	30 Perangkat Daerah			20 Perangkat Daerah	86.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	30 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			J U M L A H					11.461.674.931,00							0,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memuat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kendari, Maret 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

The image shows a circular official stamp of the Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. The stamp contains the text 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA' and 'PROVINSI SULAWESI TENGGARA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

DR. M. RIDWAN BADALLAH, S.Pd., MM

Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19700319 199702 1 001